

## **BAB III**

### **METODE DAN OBJEK PENELITIAN**

#### **3.1 Objek Penelitian**

Menurut Etta Mamang Sangadji dan Sopiah (2010, hlm 38), objek penelitian adalah apa yang harus dihubungi, dilihat, diteliti, atau dikunjungi yang kira-kira akan memberikan informasi tentang data yang akan dikumpulkan. Maka objek dalam penelitian ini adalah Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota. Adapun penelitian ini akan dilaksanakan di Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan

Alasan dilaksanakan penelitian di Pulau Jawa dan Kalimantan dikarenakan kedua pulau adalah pulau yang memiliki kelebihan diantara pulau lainnya, serta memiliki nilai pendapatan asli daerah yang merupakan komponen penting dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah dengan nominal yang besar, sehingga dengan alasan yang telah dipaparkan menjadikan objek penelitian dilaksanakan di kedua tempat tersebut.

#### **3.2 Metode Penelitian**

##### **3.2.1 Desain Penelitian**

Menurut Arikunto (2006, hlm. 51) bahwa “Desain penelitian merupakan rencana atau rancangan yang dibuat oleh peneliti, sebagai perencanaan kegiatan, yang akan dilaksanakan.” Lebih lanjut Nazir (2009, hlm. 40) menyatakan bahwa desain penelitian dalam metode ilmiah sekurang kurangnya dilakukan dengan langkah berikut :

1. Merumuskan serta mengidentifikasi masalah.
2. Mengadakan studi kepustakaan.
3. Memformulasikan hipotesis.
4. Menentukan model untuk menguji hipotesis.
5. Mengumpulkan data.
6. Menyusun, menganalisis dan memberikan interpretasi.

7. membuat generalisasi dan kesimpulan.
8. Membuat laporan ilmiah.

Sehingga berdasarkan pengertian diatas, desain penelitian adalah rancangan yang dibuat peneliti untuk mendapatkan tujuan serta kegunaan tertentu untuk memudahkan penelitian itu sendiri. Dalam hal ini, penelitian yang dilakukan penulis menggunakan metode penelitian deskriptif. Metode deskriptif menurut Nazir (2009) adalah sebagai berikut :

Suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa yang memberikan gambaran-gambaran terhadap fenomena-fenomena, menerangkan hubungan, menguji hipotesis-hipotesis, membuat prediksi dan mengadakan interpretasi yang lebih tentang hubungan-hubungan. (hlm. 52).

Dalam penelitian ini, menurut Muri Yusuf (2014, hlm. 66), metode penelitian Komparatif adalah tipe penelitian yang bersifat *ex facto*, yang diartikan bahwa data dikumpulkan setelah semua fenomena/kejadian yang diteliti berlangsung atau hal-hal yang telah terjadi sehingga tidak ada yang dikontrol. Menurut Suliyanto (2009, hlm. 10), penelitian komparatif adalah penelitian yang membandingkan sampel yang satu dengan sampel yang lain. Riset yang membandingkan sampel-sampel independen disebut riset komparatif sampel independen. Sehingga penelitian komparatif adalah penelitian yang membandingkan sampel yang ada sebagai bahan penelitian.

Berdasarkan uraian konsep tersebut maka penelitian ini menggunakan metode deskriptif komparatif dengan pendekatan kuantitatif. Metode tersebut digunakan untuk melihat ada tidaknya perbedaan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa dan Kalimantan. Cara ini dimana membandingkan kedua Pulau dengan rasio kinerja keuangan yang dipilih yaitu efektifitas, pertumbuhan, aktifitas, kemandirian, DSCR, dan efisiensi, setelah perbandingan dilakukan maka dibuat analisis deskriptif untuk mengetahui sebab adanya bila ditemukan perbedaan ketika dibandingkan dengan data berbentuk kuantitatif yang berupa angka-angka statistik.

### 3.2.2 Definisi dan Operasional Variabel

Menurut Muri Yusuf (2014, hlm. 102), variabel adalah konsep yang mempunyai variasi nilai, sedangkan konsep yang mempunyai satu nilai disebut dengan constant. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

#### 1. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja keuangan merupakan suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar, adapun kinerja keuangan pemerintah daerah diukur melalui indikator berikut :

##### a. Rasio Kemandirian

rasio kemandirian adalah rasio yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk dapat membiayai sendiri kegiatan pemerintahannya, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan melaksanakan pembangunan daerah

##### b. Rasio Efektivitas

Rasio efektifitas adalah kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

##### c. Rasio Aktivitas.

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja tidak langsung dan belanja langsung secara optimal

##### d. Rasio Pertumbuhan.

Rasio pertumbuhan (*growth ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya.

**Tabel 3.1**  
**Operasional Variabel**

Variabel	Konsep	Ukuran	Indikator	Skala
Kinerja Keuangan (Fahmi, 2013 : hlm 56)	suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar	A. Rasio Kemandirian	1. PAD 2. Dana Perimbangan	Rasio
		B. Rasio Efisiensi	1. Biaya Memungut PAD 2. Realisasi PAD	Rasio
		C. Rasio Aktivitas	1. Alokasi belanja Langsung 2. Alokasi Belanja Tidak Langsung	Rasio
		D. Rasio Pertumbuhan	1. PAD 2. Total Pendapatan Daerah 3. Belanja Langsung 4. Belanja Tidak Langsung	Rasio

### 3.2.3 Populasi dan Sampel Penelitian

Menurut Muri Yusuf (2014, hlm. 145), pengertian populasi adalah: “populasi merupakan salah satu hal yang esensial dan perlu mendapat perhatian dengan seksama apabila peneliti ingin menyimpulkan suatu hasil yang dapat dipercaya dan tepat guna untuk daerah (area) atau objek penelitiannya”. Berdasarkan uraian di atas, yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota yang ada di pulau Jawa dan Kalimantan. Jumlah Populasi berjumlah 169 Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota yang terdiri dari 56 Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Pulau Kalimantan dan 113 Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa

Romi Perdana, 2016

*ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAN KOTA DI PULAU JAWA DAN KALIMANTAN*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

sehingga berdasarkan jumlah populasi yang ada maka berikut adalah data Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota yang menjadi populasi dalam penelitian ini :

**Tabel 3.2**  
**Daftar Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota**  
**di Pulau Jawa dan Kalimantan**

PULAU JAWA	PULAU KALIMANTAN
Banten	Kalimantan Barat
1 Kab. Lebak	1 Kab. Bengkayang
2 Kab. Pandeglang	2 Kab. Kapuas Hulu
3 Kab. Serang	3 Kab. Kayong Utara
4 Kab. Tangerang	4 Kab. Ketapang
5 Kota Cilegon	5 Kab. Kubu Raya
6 Kota Serang	6 Kab. Landak
7 Kota Tangerang	7 Kab. Melawi
8 Kota Tangerang Selatan	8 Kab. Pontianak
DI Yogyakarta	9 Kab. Sambas
9 Kab. Bantul	10 Kab. Sanggau
10 Kab. Gunungkidul	11 Kab. Sekadau
11 Kab. Kulon Progo	12 Kab. Sintang
12 Kab. Sleman	13 Kota Pontianak
13 Kota Yogyakarta	14 Kota Singkawang
Jawa Barat	Kalimantan Selatan
14 Kab. Bandung	15 Kab. Balangan
15 Kab. Bandung Barat	16 Kab. Banjar
16 Kab. Bekasi	17 Kab. Barito Kuala
17 Kab. Bogor	18 Kab. Hulu Sungai Selatan
18 Kab. Ciamis	19 Kab. Hulu Sungai Tengah
19 Kab. Cianjur	20 Kab. Hulu Sungai Utara
20 Kab. Cirebon	21 Kab. Kotabaru
21 Kab. Garut	22 Kab. Tabalong
22 Kab. Indramayu	23 Kab. Tanah Bumbu
23 Kab. Karawang	24 Kab. Tanah Laut
24 Kab. Kuningan	25 Kab. Tapin
25 Kab. Majalengka	26 Kota Banjarbaru
26 Kab. Pangandaran	27 Kota Banjarmasin
27 Kab. Purwakarta	Kalimantan Timur
28 Kab. Subang	28 Kab. Berau

29	Kab. Sukabumi	29	Kab. Kutai Barat
30	Kab. Sumedang	30	Kab. Kutai Kertanegara
31	Kab. Tasikmalaya	31	Kab. Kutai Timur
32	Kota Bandung	32	Kab. Mahakam Ulu
33	Kota Banjar	33	Kab. Paser
34	Kota Bekasi	34	Kab. Penajam Paser Utara
35	Kota Bogor	35	Kota Balikpapan
36	Kota Cimahi	36	Kota Bontang
37	Kota Cirebon	37	Kota Samarinda
38	Kota Depok		Kalimantan Tengah
39	Kota Sukabumi	38	Kab. Barito Selatan
40	Kota Tasikmalaya	39	Kab. Barito Timur
	Jawa Timur	40	Kab. Barito Utara
41	Kab. Bangkalan	41	Kab. Gunung Mas
42	Kab. Banyuwangi	42	Kab. Kapuas
43	Kab. Blitar	43	Kab. Katingan
44	Kab. Bojonegoro	44	Kab. Kotawaringin Barat
45	Kab. Bondowoso	45	Kab. Kotawaringin Timur
46	Kab. Gresik	46	Kab. Lamandau
47	Kab. Jember	47	Kab. Murung Raya
48	Kab. Jombang	48	Kab. Pulang Pisau
49	Kab. Kediri	49	Kab. Sukamara
50	Kab. Lamongan	50	Kab. Seruyan
51	Kab. Lumajang	51	Kota Palangka Raya
52	Kab. Madiun		Kalimantan Utara
53	Kab. Magetan	52	Kab. Bulungan
54	Kab. Malang	53	Kab. Malinau
55	Kab. Mojokerto	54	Kab. Nunukan
56	Kab. Nganjuk	55	Kab. Tana Tidung
57	Kab. Ngawi	56	Kota Tarakan
58	Kab. Pacitan		
59	Kab. Pamekasan		
60	Kab. Pasuruan		
61	Kab. Ponorogo		
62	Kab. Probolinggo		
63	Kab. Sampang		
64	Kab. Sidoarjo		
65	Kab. Situbondo		
66	Kab. Sumenep		
67	Kab. Trenggalek		
68	Kab. Tuban		

69	Kab. Tulungagung	
70	Kota Batu	
71	Kota Blitar	
72	Kota Kediri	
73	Kota Madiun	
74	Kota Malang	
75	Kota Mojokerto	
76	Kota Pasuruan	
77	Kota Probolinggo	
78	Kota Surabaya	
	Jawa Tengah	
79	Kab. Banjarnegara	
80	Kab. Banyumas	
81	Kab. Batang	
82	Kab. Blora	
83	Kab. Boyolali	
84	Kab. Brebes	
85	Kab. Cilacap	
86	Kab. Demak	
87	Kab. Grobogan	
88	Kab. Jepara	
89	Kab. Karanganyar	
90	Kab. Kebumen	
91	Kab. Kendal	
92	Kab. Klaten	
93	Kab. Kudus	
94	Kab. Magelang	
95	Kab. Pati	
96	Kab. Pekalongan	
97	Kab. Pemalang	
98	Kab. Purbalinggo	
99	Kab. Purworejo	
100	Kab. Rembang	
101	Kab. Semarang	
102	Kab. Sragen	
103	Kab. Sukaharjo	
104	Kab. Tegal	
105	Kab. Temanggung	
106	Kab. Wonogiri	
107	Kab. Wonosobo	
108	Kota Magelang	

109	Kota Pekalongan	
110	Kota Salatiga	
111	Kota Semarang	
112	Kota Surakarta	
113	Kota Tegal	

Sumber : Badan Pusat Statistik tahun 2015

Sedangkan menurut Muri Yusuf (2014, hlm. 150), sampel adalah sebagian populasi yang terpilih dan mewakili populasi tersebut. Untuk memudahkan penelitian, maka perlu ditetapkan sampel yang merupakan sebagian dari jumlah populasi dengan memperlihatkan keabsahan dari sampel yang diambil. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan penelitian tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut.

Dalam penelitian ini, pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *Purposive Sampling*, Menurut Sugiyono (2012, hlm 85) *Sampling Purposive* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan yang digunakan dalam penentuan sampel dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa dan Kalimantan yang membuat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2012 dan 2013. Dikarenakan Kab. Mahakam Ulu dan Kab. Pangandaran tidak terdapat laporan keuangan Pemerintah Daerah pada salah satu tahun tersebut maka sampel berjumlah 167 Kab/Kota sebagai berikut :

**Tabel 3.3**

**Daftar Sampel Penelitian**

PULAU JAWA		PULAU KALIMANTAN	
	<b>Banten</b>		<b>Kalimantan Barat</b>
1	Kab. Lebak	1	Kab. Bengkayang
2	Kab. Pandeglang	2	Kab. Kapuas Hulu
3	Kab. Serang	3	Kab. Kayong Utara
4	Kab. Tangerang	4	Kab. Ketapang
5	Kota Cilegon	5	Kab. Kubu Raya
6	Kota Serang	6	Kab. Landak
7	Kota Tangerang	7	Kab. Melawi



8	Kota Tangerang Selatan	8	Kab. Pontianak
	<b>DI Yogyakarta</b>	9	Kab. Sambas
9	Kab. Bantul	10	Kab. Sanggau
10	Kab. Gunungkidul	11	Kab. Sekadau
11	Kab. Kulon Progo	12	Kab. Sintang
12	Kab. Sleman	13	Kota Pontianak
13	Kota Yogyakarta	14	Kota Singkawang
	<b>Jawa Barat</b>		<b>Kalimantan Selatan</b>
14	Kab. Bandung	15	Kab. Balangan
15	Kab. Bandung Barat	16	Kab. Banjar
16	Kab. Bekasi	17	Kab. Barito Kuala
17	Kab. Bogor	18	Kab. Hulu Sungai Selatan
18	Kab. Ciamis	19	Kab. Hulu Sungai Tengah
19	Kab. Cianjur	20	Kab. Hulu Sungai Utara
20	Kab. Cirebon	21	Kab. Kotabaru
21	Kab. Garut	22	Kab. Tabalong
22	Kab. Indramayu	23	Kab. Tanah Bumbu
23	Kab. Karawang	24	Kab. Tanah Laut
24	Kab. Kuningan	25	Kab. Tapin
25	Kab. Majalengka	26	Kota Banjarbaru
26	Kab. Purwakarta		<b>Kalimantan Timur</b>
27	Kab. Subang	27	Kota Banjarmasin
28	Kab. Sukabumi	28	Kab. Berau
29	Kab. Sumedang	29	Kab. Kutai Barat
30	Kab. Tasikmalaya	30	Kab. Kutai Kertanegara
31	Kota Bandung	31	Kab. Kutai Timur
32	Kota Banjar	32	Kab. Paser
33	Kota Bekasi	33	Kab. Penajam Paser Utara
34	Kota Bogor	34	Kota Balikpapan
35	Kota Cimahi	35	Kota Bontang
36	Kota Cirebon	36	Kota Samarinda
37	Kota Depok		<b>Kalimantan Tengah</b>
38	Kota Sukabumi	37	Kab. Barito Selatan
39	Kota Tasikmalaya	38	Kab. Barito Timur
	<b>Jawa Timur</b>	39	Kab. Barito Utara
40	Kab. Bangkalan	40	Kab. Gunung Mas
41	Kab. Banyuwangi	41	Kab. Kapuas
42	Kab. Blitar	42	Kab. Katingan

43	Kab. Bojonegoro	43	Kab. Kotawaringin Barat
44	Kab. Bondowoso	44	Kab. Kotawaringin Timur
45	Kab. Gresik	45	Kab. Lamandau
46	Kab. Jember	46	Kab. Murung Raya
47	Kab. Jombang	47	Kab. Pulang Pisau
48	Kab. Kediri	48	Kab. Sukamara
49	Kab. Lamongan	49	Kab. Seruyan
50	Kab. Lumajang	50	Kota Palangka Raya
51	Kab. Madiun		<b>Kalimantan Utara</b>
52	Kab. Magetan	51	Kab. Bulungan
53	Kab. Malang	52	Kab. Malinau
54	Kab. Mojokerto	53	Kab. Nunukan
55	Kab. Nganjuk	54	Kab. Tana Tidung
56	Kab. Ngawi	55	Kota Tarakan
57	Kab. Pacitan		
58	Kab. Pamekasan		
59	Kab. Pasuruan		
60	Kab. Ponorogo		
61	Kab. Probolinggo		
62	Kab. Sampang		
63	Kab. Sidoarjo		
64	Kab. Situbondo		
65	Kab. Sumenep		
66	Kab. Trenggalek		
67	Kab. Tuban		
68	Kab. Tulungagung		
69	Kota Batu		
70	Kota Blitar		
71	Kota Kediri		
72	Kota Madiun		
73	Kota Malang		
74	Kota Mojokerto		
75	Kota Pasuruan		
76	Kota Probolinggo		
77	Kota Surabaya		
	<b>Jawa Tengah</b>		
78	Kab. Banjarnegara		
79	Kab. Banyumas		
80	Kab. Batang		

81	Kab. Blora	
82	Kab. Boyolali	
83	Kab. Brebes	
84	Kab. Cilacap	
85	Kab. Demak	
86	Kab. Grobogan	
87	Kab. Jepara	
88	Kab. Karanganyar	
89	Kab. Kebumen	
90	Kab. Kendal	
91	Kab. Klaten	
92	Kab. Kudus	
93	Kab. Magelang	
94	Kab. Pati	
95	Kab. Pekalongan	
96	Kab. Pemasang	
97	Kab. Purbalinggo	
98	Kab. Purworejo	
99	Kab. Rembang	
100	Kab. Semarang	
101	Kab. Sragen	
102	Kab. Sukaharjo	
103	Kab. Tegal	
104	Kab. Temanggung	
105	Kab. Wonogiri	
106	Kab. Wonosobo	
107	Kota Magelang	
108	Kota Pekalongan	
109	Kota Salatiga	
110	Kota Semarang	
111	Kota Surakarta	
112	Kota Tegal	

Sumber : Badan Pusat Statistik tahun 2015

Statistik dalam penelitian ini yaitu data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa dan Kalimantan Tahun 2012 dan 2013.

### 3.2.4 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Muri Yusuf (2014, hlm. 198). Teknik pengumpulan data hendaknya dilakukan setelah berbagai langkah penelitian sebelumnya dirumuskan dengan baik. Sedangkan menurut Nazir (2009, hlm. 174), pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam metode ilmiah. Sehingga teknik pengumpulan data merupakan langkah penting dalam sebelum akan dilakukan analisis data. Dalam penelitian ini dilakukan peninjauan dokumen-dokumen. Adapun data yang dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Menurut Kuncoro (2013, hlm. 148) sumber sekunder merupakan sumber yang biasanya telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data. Teknik pengumpulan data sekunder pada penelitian ini menggunakan teknik telaah dokumen. Telaah dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dokumen-dokumen perusahaan yang sesuai dengan objek yang sedang diteliti.

Peneliti ini menggunakan data *cross section*. Menurut Nachrowi dan Usman (2006, hlm. 309), data *cross section* merupakan data yang dikumpulkan dalam satu waktu terhadap banyak individu. Adapun data sekunder yang diteliti adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa dan Kalimantan tahun 2012 dan 2013.

### 3.2.5 Teknik Analisis Data

Menurut Nazir (2009, hlm. 378), teknik analisis data dapat memberikan dasar bertolak belakang dalam menjelaskan hubungan-hubungan yang terjadi. Sehingga teknik analisis data adalah proses akhir dari penelitian setelah hipotesis, pengumpulan data yang telah dilakukan yang akan memberikan hasil pada penelitian yang dilakukan.

Prosedur pengolahan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data yang didapat dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk).

2. Mengkonversikan data-data yang diperoleh dari DJPK yaitu Realisasi APBD kedalam *proxy-proxy* yang akan digunakan sebagai variabel yang dibandingkan dengan menggunakan *Software Microsoft Excel* untuk tiap-tiap tahun selama periode penelitian, yaitu tahun 2012 dan 2013.
3. Menyimpan Data hasil olahan yang ada di *Ms. Excel*.
4. Kemudian dilakukan analisis deskriptif di *MS. Excel*.
5. Kemudian setelah analisis deskriptif, maka dilakukan uji normalitas dengan Kolmogorov smirnov untuk mengetahui distribusi data normal atau tidak
6. Setelah dilakukan uji normalitas dengan Kolmogorov smirnov, maka dilakukan uji beda dengan *t-test independent two samples* atau *Mann Whitney*.
7. Setelah dilakukan uji beda, dilihat hasilnya apakah terdapat perbedaan atau tidak.
8. Bila terdapat perbedaan maka digunakan analisis deskriptif untuk menjelaskan penyebab perbedaan yang ada.
9. Dibuat kesimpulan serta saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah uji beda dimana menggunakan *t-test two sample independent/Uji Mann Whitney* untuk membandingkan kedua data, dan untuk mengetahui tingkat signifikansi dari variabel maka digunakan uji statistik diantaranya :

### 3.2.5.1 Statistik Deskriptif

Menurut Ghozali (2013, hlm. 19), Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, *minimum*, *range*, *sum*, kurtosis, dan skewness (kemencengan distribusi).

### 3.2.5.2 Uji Asumsi Klasik

Dalam penelitian ini digunakan hanya satu uji asumsi klasik, yaitu uji Normalitas, dikarenakan penelitian ini hanya membandingkan kedua kelompok data, sehingga yang diperlukan hanya Uji Normalitas untuk melihat distribusi data normal tidaknya.

#### A. Uji Normalitas

Menurut Misbahuddin dan Iqbal Hasan (2013, hlm. 278), Uji Normalitas adalah uji prasyarat tentang kelayakan data untuk dianalisis dengan menggunakan statistik parametrik atau statistik non Parametrik. Melalui uji ini dapat diketahui bentuk distribusi data tersebut, yaitu berdistribusi normal atau tidak.

Uji ini berkaitan dengan penggunaan Statistik Parametrik dan Statistik non Parametrik. Statistik Parametrik dapat digunakan sebuah data lolos uji normalitas, dan ini berarti data berdistribusi normal. Statistik non Parametrik digunakan apabila sebuah data tidak lolos dari uji normalitas maka Statistik Parametrik yang digunakan, dan ini berarti data tidak berdistribusi normal. Bagi sebuah data yang berdistribusi normal, untuk dianalisis dengan statistik Parametrik, maka datanya harus dibuat berdistribusi normal, yaitu dengan cara transformasi data ke distribusi normal baku. Dalam uji normalitas ini menggunakan uji Kolmogorov smirnov.

#### B. Uji Kolmogorov Smirnov

Menurut Misbahuddin dan Iqbal Hasan (2013, hlm. 281), Uji Kolmogorov smirnov adalah uji normalitas data dengan menggunakan aturan Kolmogorov smirnov. Prosedur uji statistiknya sebagai berikut :

- a. Menentukan formula hipotesis.  
 $H_0$  : data berdistribusi Normal  
 $H_1$  : data tidak berdistribusi normal
- b. Menentukan taraf nyata ( $\alpha$ ) dan nilai D

Taraf nyata yang digunakan adalah 5%

Nilai D dengan n tertentu.

$$D_{(\alpha)(n)} = D \text{ Tabel}$$

c. Menentukan kriteria pengujian

$H_0$  diterima apabila D hitung  $\leq$  D Tabel

$H_0$  ditolak apabila D hitung  $>$  D Tabel

d. Menentukan nilai uji statistik

e. Menyimpulkan apakah  $H_0$  diterima atau tidak.

2 kondisi yang terjadi pada uji Kolmogorov smirnov :

1. Bila data berdistribusi normal maka menggunakan Uji Beda t- test Two Sample Independent
2. Bila data tidak berdistribusi Normal, maka menggunakan Uji beda Mann Whitney

### 3.2.5.3 Uji Beda

1. Independent Samples t Test

Menurut Stanislaus (2009, hlm. 137), uji t dua sampel independen digunakan untuk membandingkan selisih dua purata(mean) dari dua sampel yang independen dengan asumsi data terdistribusi normal, digunakan uji dua sisi pada penelitian ini. Uji beda 2 sampel independen memiliki uji levene's test sebelum menyimpulkan hipotesis.

Levene's test

Menurut Stanislaus (2009, hlm. 161 uji levene's adalah uji yang digunakan untuk menguji apakah sampel sebanyak k memiliki variance yang sama. Uji levene's test memiliki 2 alternatif uji untuk dilakukan uji t test , yaitu equal variances assumed dan equal variances not assumed.

Equal variances assumed

Yaitu asumsi dimana kedua variance sama besar/homogen. Rumus uji t test nya :

$$t = \frac{x - y}{sp \sqrt{\frac{1}{n_x} + \frac{1}{n_y}}}$$

Equal variances not assumed

Yaitu asumsi dimana kedua variance tidak sama besar/heterogen.

Dengan rumus hitung sebagai berikut :

$$t = \frac{x - y}{\sqrt{\frac{s_x^2}{n_x} + \frac{s_y^2}{n_y}}}$$

Dengan pengujian hipotesis sebagai berikut :

A. Jika P- Value  $< \alpha$  maka  $H_0$  ditolak

B. Jika P – Value  $\geq \alpha$  maka  $H_0$  diterima

Dalam penelitian ini menggunakan uji siginifikansi sebesar 5 %.

## 2. Mann Whitney

Menurut Stanislaus (2009, hlm. 321), uji Mann Whitney adalah uji statistika Non Parametrik. Uji Mann Whitney merupakan alternative dari uji t dua sampel independen. Uji Mann Whitney digunakan untuk membandingkan dua sampel independen dengan skala ordinal atau interval tapi tidak berdistribusi normal. Uji Mann Whitney berdasarkan jumlah peringkat (rank) data. Data dari kedua sampel digabungkan dan diberi peringkat dari terkecil hingga terbesar. Dalam uji ini digunakan uji hipotesis dua sisi.

Rumus uji Mann Whitney sebagai berikut :

$$z_H = \frac{U - E(U)}{\sigma}$$

Dengan :

$$U = n_1 n_2 + \frac{n_1 (n_1 + 1)}{2} - R_1$$

$$E(U) = \frac{n_1 (n_1 + n_2) + 1}{2}$$



$$\sigma = \sqrt{\frac{n_1 n_2 (n_1 + n_2) - 1}{12}}$$

Dimana :

$R_1$  = jumlah peringkat pertama

$n_1$  = jumlah sampel 1

$n_2$  = jumlah sampel 2

Pengujian Hipotesis dalam Uji Mann Whitney sebagai berikut :

C. Jika P- Value  $< \alpha$  maka  $H_0$  ditolak

D. Jika P – Value  $\geq \alpha$  maka  $H_0$  diterima

Tingkat uji signifikansi yang digunakan adalah 5 %.

Rumusan hipotesis untuk kedua alat analisis uji beda adalah sebagai berikut :

Hipotesis 1

A.  $H_0 : \mu_1 = \mu_2$  : tidak terdapat perbedaan rasio kemandirian pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa dan Kalimantan.

B.  $H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$  : terdapat perbedaan rasio kemandirian pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa dan Kalimantan.

Hipotesis 2

A.  $H_0 : \mu_1 = \mu_2$  : tidak terdapat perbedaan rasio efektifitas pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa dan Kalimantan.

B.  $H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$  : terdapat perbedaan rasio efektifitas pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa dan Kalimantan.

Hipotesis 3

- A.  $H_0 : \mu_1 = \mu_2$  : tidak terdapat perbedaan rasio aktivitas belanja tidak langsung pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa dan Kalimantan.
- B.  $H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$  : terdapat perbedaan rasio aktivitas belanja tidak langsung pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa dan Kalimantan.

#### Hipotesis 4

- A.  $H_0 : \mu_1 = \mu_2$  : tidak terdapat perbedaan rasio aktivitas belanja langsung pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa dan Kalimantan.
- B.  $H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$  : terdapat perbedaan rasio aktivitas belanja langsung pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa dan Kalimantan.

#### Hipotesis 5

- A.  $H_0 : \mu_1 = \mu_2$  : tidak terdapat perbedaan rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa dan Kalimantan.
- B.  $H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$  : terdapat perbedaan rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa dan Kalimantan.

#### Hipotesis 6

- A.  $H_0 : \mu_1 = \mu_2$  : tidak terdapat perbedaan rasio pertumbuhan pendapatan daerah pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa dan Kalimantan.
- B.  $H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$  : terdapat perbedaan rasio pertumbuhan pendapatan daerah pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa dan Kalimantan.

#### Hipotesis 7

- A.  $H_0 : \mu_1 = \mu_2$  : tidak terdapat perbedaan rasio pertumbuhan belanja tidak langsung pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa dan Kalimantan.
- B.  $H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$  : terdapat perbedaan rasio pertumbuhan belanja tidak langsung pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa dan Kalimantan.

#### Hipotesis 8

- A.  $H_0 : \mu_1 = \mu_2$  : tidak terdapat perbedaan rasio pertumbuhan belanja langsung pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa dan Kalimantan.
- B.  $H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$  : terdapat perbedaan rasio pertumbuhan belanja langsung pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa dan Kalimantan.